

Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia

Malikul Kusno

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, alumnus Hubungan Internasional Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta dan peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina

Abstract: *Bung Hatta, one of Indonesian founding fathers, has had very brilliant vision for Indonesian foreign policy following our independence August 17, 1945. Since the end of colonial era, his principle to implement “politik bebas aktif” (free and active politics) in international arena has been underpinning for Indonesia foreign policy, both in the era of Cold War in what the so-called “sailing between two reefs namely Communist Bloc and Capitalist one” and in the aftermath. Hatta’s vision is still relevant for us in implementing Indonesian’s foreign policy in the era of globalized world today, in which the fall of communism and the winning of capitalism has been the challenges for the developing countries such as the Non-Alignment movement and The Third World countries in doing their foreign policy for global peace, justice and security. The World is changing, but Hatta’s principle for Indonesian foreign policy is still contextual for our age.*

Kata Kunci: *Hatta; foreign policy; Indonesia*

Pendahuluan

Studi pemikiran politik (political thought) sebetulnya sejak lama dikenal oleh akademisi politik sejak zaman Yunani Kuno. Dalam pengertian ini, pemikiran politik memiliki hubungan erat dengan filsafat politik, moralitas, etika politik dan idealisme politik yang dianggap normatif bagi penyelenggaraan negara.² Namun perkembangan studi politik selanjutnya telah membedakan bidang-bidang pembahasan dalam filsafat politik, etika politik, dengan ilmu-ilmu politik pada umumnya (political science).

Franz Magnis Suseno, dalam karyanya yang terkenal *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, menjelaskan panjang lebar tentang hubungan dan perbedaan bidang-bidang pembahasan itu. Menurut Magnis Suseno, secara formal filsafat politik, termasuk etikanya, apabila diperbandingkan dengan ilmu-ilmu politik, yaitu seperti ilmu pengetahuan di tingkat II dengan ilmu pengetahuan tingkat I. Filsafat menurutnya, merupakan suatu meta-sciences. Artinya filsafat tidak langsung menggarap realitas, melainkan menggarap realitas yang telah diangkat ke dalam pengertian ilmiah oleh ilmu-ilmu yang spesifik.

Begitupun dengan penggambaran segi-segi relevan dimensi politis manusia, perumusan istilah-istilah dan dalil-dalil yang membantu untuk mendeskripsikan proses-proses yang berlangsung, penyediaan strategi-strategi alternatif dalam kerangka skema tujuan –sarana, pengamatan terhadap segala macam lembaga politis atau quasi-politis, terhadap kegiatan-kegiatan dan hubungan antara mereka, klasifikasi pelbagai ideologi dan sistem nilai politik dengan implikasi-implikasi masing-masing – bukanlah merupakan tugas filsafat politik melainkan tugas dari ilmu-ilmu politik. Sedangkan filsafat politik sebagai ilmu tingkat II mengupas argumentasi-argumentasi dan pernyataan-pernyataan ilmu-ilmu politik dari segi hakikat dan realitas manusia dan secara spesifik mempersoalkan (bukan saja menjelaskan) pola-pola legitimasi dan tuntutan-tuntutan normatif dasar yang dikemukakan. Dalam kerangka ini tugas etika politik harus ditentukan.

Lebih jauh Magnis Suseno membedakan secara terperinci antara tiga tingkatan kriteria bagi betul salahnya tindakan politik. Di tingkat pertama dan yang paling umum kita menemukan

prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tingkat dua bersifat menengah dan sudah mengacu ke suatu bidang permasalahan tertentu, misalnya prinsip bahwa kekuasaan harus dilegitimasi secara demokratis. Tingkat tiga meyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip-prinsip pertama memang berlaku umum dan tanpa pengecualian, tetapi masih bersifat sangat abstrak sehingga tidak dapat langsung dioperasikan. Prinsip itu adalah wewenang khas etika umum.

Sedangkan bidang khas etika politik adalah prinsip-prinsip tingkat II. Namun prinsip-prinsip itu hanya dapat ditentukan secara positif dengan mengacu pada kekhasan bidangnya itu. Misalnya saja, tuntutan legitimasi demokratis mengandaikan bahwa dalam realitas politik kehendak masyarakat dapat diketahui dan dibuat efektif dalam pengambilan kebijaksanaan kongkret. Memastikan syarat-syarat seperti itu termasuk wewenang ilmu-ilmu politik. Jadi untuk merumuskan prinsip-prinsip tingkat II, tidak cukup kalau etika politik bertolak dari prinsip-prinsip moral dasar (tingkat I), melainkan etika politik secara hakiki membutuhkan masukan dari ilmu-ilmu politik tentang struktur realitas politik dengan permasalahan-permasalahannya. Penerjemahan prinsip-prinsip tingkat II itu ke dalam kriteria penilaian kongkret (kriteria tingkat III) bukanlah tugas etika politik, melainkan membutuhkan keahlian ilmu-ilmu politik.

Tulisan ini bertolak dari prinsip-prinsip pemikiran politik di tingkat ke-II, dan sekaligus mengacu pada prinsip ketiga yang meyangkut kriteria-kriteria penilaian zaman dan situasi. Dalam prinsip tingkat ke II, penulis akan membahas pemikiran politik bebas aktif Mohammad Hatta yang menjadi prinsip dasar tentang bagaimana politik luar negeri Indonesia harus disusun dan ditata. Sementara prinsip tingkat ketiga akan berusaha memberikan penilaian terhadap gagasan politik bebas aktif dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembahasan sejarah pemikiran politik bebas aktif akan banyak mewarnai tulisan ini.

Pengertian Politik Luar Negeri

Tulisan ini mencoba membahas politik luar negeri Indonesia atau yang dikenal dengan politik bebas aktif. Dalam membahas politik bebas aktif, penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian politik luar negeri secara umum. Konsep politik luar negeri sendiri, sebenarnya memiliki keterkaitan atau bahkan penggunaannya seringkali disejajarkan dengan istilah politik internasional (international politics) dan hubungan internasional (international relations). Kedua terminologi ini, secara umum inheren dalam pembahasan-pembahasan masalah-masalah internasional.

Dalam diskursus hubungan internasional kontemporer, ada dua pendapat ahli yang membedakan pengertian politik luar negeri dengan kebijaksanaan luar negeri. Pendapat pertama, menjelaskan bahwa politik luar negeri memiliki pengertian yang sama dengan kebijaksanaan luar negeri. Apa yang dimaksudkan dengan politik luar negeri adalah kebijaksanaan luar negeri. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa politik luar negeri adalah suatu strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Sebagaimana dikatakan oleh empat guru besar Universitas California Selatan –Carlton Clymer Rodee, Totton James Anderson, Carl Quixmny, Christol dan Thomas H Greene, politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri memiliki hubungan erat dengan proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri Indonesia dalam bukunya, Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Tahun 1984-1988) menjelaskan bahwa politik luar negeri

adalah suatu kebijaksanaan politik yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia inter- nasional dan usahanya untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasional ke dalam masyarakat antar bangsa.

Pandangan kedua melihat adanya garis perbedaan antara politik luar negeri dan kebijaksanaan politik luar negeri. Perbedaan istilah itu tidaklah begitu dikenal dalam literatur hubungan internasional, namun yang dikenal adalah istilah *foreign policy* (kebijakan luar negeri), bukan *foreign politics* (politik luar negeri). Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai suatu identitas yang menjadi karakteristik pembeda antara suatu negara dengan negara-negara lain di dunia. Dalam kaitan itu, politik luar negeri adalah posisi pembeda, atau suatu paradigma besar yang dianut oleh sebuah negara tentang cara pandangnya terhadap dunia, atau suatu wawasan internasional. Dengan demikian, politik luar negeri cenderung tetap dan stabil.

Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi penyelenggaraan yang dirapikan dengan variasi dan bergantung pada pendekatan, gaya dan keinginan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian akan bergantung pada politik luar negeri. Akan tetapi, para penggagas studi identitas, melihat bahwa identitas sebuah bangsa tidaklah dibangun di ruang hampa (*vacuum*), tetapi pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi-interaksi negara bersangkutan dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Hal ini telah mengingatkan kita bahwa politik luar negeri sesungguhnya bukan sesuatu yang sakral dan abadi sepanjang zaman. Jadi meskipun ia relatif tetap, layaknya sebuah lilin, ia dapat berubah bentuknya. Dengan demikian, politik luar negeri pun harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika hubungan internasional yang terjadi.

Kepentingan Nasional

Penggunaan konsep kepentingan nasional dalam tulisan ini, ditujukan untuk menjelaskan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif. Dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan oleh suatu negara. Oleh karena itu, kepentingan nasional merupakan kunci utama dalam politik luar negeri.

Menurut Coulombis dan Wolfe, dalam *Introduction to International Relations*, politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan atau kepentingan nasional yang menggunakan *power* dan *capability*.⁸ Dalam hal ini politik luar negeri dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Pemerintah sendiri berpengaruh besar dan turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya sebagai *pressure group* juga turut menentukan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Konsep kepentingan nasional sendiri telah lama menjadi perbincangan pro dan kontra di kalangan akademisi hubungan internasional. Paul Seabury misalnya menjelaskan bahwa kepentingan nasional seringkali dihubungkan dengan sekumpulan dari maksud-maksud tertentu yang oleh suatu negara diusahakan untuk dicapai pelaksanaannya dalam politik luar negeri. Dalam pada itu, pengertian kepentingan nasional adalah suatu pengertian yang deskriptif, yaitu bahwa kepentingan nasional dipercaya sebagai tujuan yang mesti dicapai oleh suatu negara melalui peran pemerintah. Definisi demikian berarti usaha untuk memindahkan abstraksi ke dalam fakta-fakta (kenyataan), sehingga rumusan kepentingan nasional dapat sejalan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Sedangkan pengertian tujuan politik suatu negara adalah untuk mewujudkan kepentingan

nasional. Tujuan itu mencakup deskripsi atas situasi negara di masa mendatang sekaligus sebagai harapan dari pembentukan masa depan yang dicita-citakannya. Dengan demikian, suatu negara sudah sepatutnya merancang suprastruktur (sarana), dengan melakukan pelbagai tindakan yang memperlihatkan adanya kebutuhan dan keinginan serta tujuan negara tersebut. Perwujudannya pertama kali haruslah mengacu pada penetapan kebijakan politik yang harus mempertimbangkan faktor-faktor internal (domestik) dan faktor eksternal (geopolitik).

Dalam mencapai sasaran yang sesuai dengan impian kepentingan nasionalnya. Pemerintah suatu negara harus dapat mengoperasionalkan beberapa instrumen yang ada, baik yang legal maupun yang ilegal. Instrumen legal dilakukan dengan menjalin kerjasama (koperasi), di mana keabsahannya diakui, misalnya diplomasi. Sedangkan instrumen ilegal biasanya dipergunakan dalam kondisi negara yang memperlihatkan adanya oposisi, misalnya subversi. Perlu untuk dijelaskan di sini bahwa sekalipun hubungan antar negara berada dalam situasi konflik yang diwarnai oleh sikap tidak kooperatif, namun sepanjang masih adanya kemauan untuk mencapai kesepakatan maka instrumen legal masih dapat dipakai. Dengan demikian, kata kunci (key word) dalam pelaksanaan kepentingan nasional terletak pada peranan besar diplomasi.

Konsep Dasar Diplomasi

Dalam pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi merupakan salah satu instrumen paling penting dalam usaha mensukseskan kepentingan nasional suatu negara. Melihat penting peran tersebut, penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu asal muasal kata diplomasi. Diplomasi berasal dari kata Yunani *diploun* yang berarti melipat. Pada masa kekaisaran Romawi, diplomasi menjadi semacam paspor yang diperlukan bagi para pejabat negara untuk melakukan perjalanan dengan dinas transport atau pos negara. Ketika Kardinal Richelieu menjadi perdana menteri Perancis pada abad 17, istilah *res-diplomatica* dipopulerkan dengan kegiatan-kegiatan diplomatik negara.⁹

Pada masa pencerahan Eropa (*renaissance*), negara Yunani dan Italia memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan diplomasi. Sejak zaman itu istilah diplomasi dipakai sebagai instrumen politik negara. Filsuf politik abad pencerahan, Niccollo Machiavelli, dalam salah satu bukunya yang terkenal *Il Principe* (terjemahan Inggris *The Prince*) menjelaskan bahwa meskipun para diplomat dalam tugasnya diatur oleh politik nasional dan dengan sesuka hati menggunakan tipu muslihat dan kelicikan, tetapi secara struktural mereka telah mengembangkan tertib prosedural diplomasi.¹⁰

Perkembangan-perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa diplomasi seringkali dijadikan sebagai alat regulasi yang paling efektif dalam memecahkan kebuntuan yang diakibatkan oleh situasi politik internasional. Diplomasi telah memberikan harapan bagi perkembangan hidup manusia untuk membangun suatu dunia baru yang tertib dan berkeadilan.

Dalam studi-studi hubungan internasional kontemporer, pengertian diplomasi seringkali disepadankan dengan pengiriman pesan antar Departemen Luar Negeri. Pesan-pesan itu sangat bergantung pada cara dan gaya (*style*) pengiriman pesan. Sangat penting bagi seorang Duta Besar untuk mengetahui dan memahami pola diskusi dan negosiasi yang disukai oleh para agen negara tuan rumah agar bisa menangkap isi pesan yang disampaikan. Jika tidak, dapat memicu sikap permusuhan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Seorang akademisi hubungan internasional, J. Frankel, menjelaskan bahwa diplomasi memiliki ruang lingkup transaksi internasional yang sangat luas, sehingga sanggup dilaksanakan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan melibatkan Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Wakil Diplomatik di PBB maupun oleh Kepala Negara sendiri. Sedangkan fungsi pokok diplomasi

adalah seba- gai pelaporan (reporting) dan negosiasi. Menurut Couloumbus dan Wolfe, pelaporan diperlukan sebagai observasi terhadap kondisi sosial, politik, eko- nomi, budaya dan angkatan bersenjata dari tuan rumah. Hasil ini disam- paikan kepada negaranya, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.

Pengertian Transformasi Sistem Internasional

Dalam literatur hubungan internasional, sedikit sekali dapat kita temukan perbincangan mengenai transformasi sistem internasional, terkecuali apa- bila seseorang dapat mudah kita alihkan perhatiannya pada pengaruh peru- bahan-perubahan struktural dan sistemik dalam dunia internasional. Untuk menjelaskan pengertian ini, penulis mengacu pada pemikiran yang diberi- kan oleh Charles A. Mc Clelland tentang transformasi sistem internasional. Menurut Mc. Clelland, sesuatu yang telah ditransformasikan, maka telah berubah keadaannya dan berubah bentuknya. Dengan demikian, ia tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor atau bentuk-bentuk semula.

Pada umumnya, kelompok penganut transformasi sistem internasional mengandaikan pada kenyataan bahwa pengaruh-pengaruh yang kuat dalam hubungan internasional lahir dari pembaharuan dasar-dasar hubungan itu. Pembaharuan dalam pengertian ini, terjadi dalam sistem berfikir masya- rakat. Pertama-tama bermula dari sistem tradisional (yang alami), kemudian berubah ke sistem modern yang banyak sekali melibatkan kemajuan-kema- juan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terutama kema- juan di bidang persenjataan militer, dan ledakan jumlah penduduk yang memuncak sepanjang abad XX serta gerak maju dalam studi ilmu politik dan studi ilmu-ilmu sosial lainnya. Perubahan sistem berfikir ini, mem- pengaruhi relasi-relasi kekuasaan antar negara-bangsa. Transformasi system internasional sendiri, umumnya sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan hubungan kekuasaan antar negara-bangsa itu.

Dalam konteks dewasa ini, dunia yang telah mengalami transformasi, seperti setelah Perang Dingin. Tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor dan kepen- tingan kelompok Timur dan Barat atau antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, melainkan oleh peran politik bersama (multilateral), yang memu- satkan perhatiannya pada soal-soal keamanan regional, peningkatan hu- bungan ekonomi-politik internasional yang berlanjut pada pengembangan perdagangan bebas (free trade) atau globalisasi ekonomi, serta fokus perha- tian terhadap media massa nasional maupun internasional.¹³

Melalui dua metode ini, akan diperoleh data sebagai dasar untuk masuk ke dalam permasalahan. Data-data itu dikumpulkan dengan menggunakan tek- nik dokumentasi.¹⁴ Selanjutnya data akan dikelola melalui pendekatan intrinsik, yaitu dengan melakukan analisa tekstual terhadap keseluruhan pemikiran politik bebas aktif yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang terdapat dalam bentuk naskah pidato, artikel-artikel dan tulisan- tulisannya yang telah dibukukan. Hasil ini kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan ekstrinsik, yaitu dengan melibatkan ilmu bantu, termasuk ilmu sejarah dan ilmu politik.

Politik Bebas Aktif dan Latar Belakang Sejarah

Setelah gema proklamasi kemerdekaan, Indonesia segera terjun ke dalam pelbagai lautan peristiwa yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya dan memaksanya berada dalam pilihan-pilihan pokok yang sulit dan rumit.¹⁵ Pergulatan politik internasional memaksa Indonesia berada dalam payung politik Barat, dan demi untuk mempertahankan kemerdekaannya harus ber- siap-siap menghadapi pendaratan tentara Sekutu, yang antara lain

mempunyai misi menerima penyerahan tentara Jepang, namun sekaligus terikat pada janji untuk membantu pemerintah Belanda memulihkan kembali jajahannya di Indonesia.

Akibatnya, upaya pemerintah untuk memperoleh pengakuan dunia internasional (de jure) menemui hambatan serius, setidaknya untuk dalam waktu empat tahun (1945-1949). Situasi yang terakhir ini, segera memicu terjadinya fragmentasi internal yang tercermin dari begitu singkatnya usia kabinet pada masa awal pemerintahan. Sejak 19 Agustus 1945 sampai dengan 20 Desember 1949, secara bergiliran, kabinet mengalami jatuh bangun yang masing-masing usianya tak lebih dari dua tahunan.

Di sisi lain, Belanda dengan cepat memasuki jantung-jantung teritorial Indonesia. Sampai dengan tahun 1948, sedikitnya empat wilayah besar Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Irian Jaya, kembali dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Akibatnya, pertempuran terbuka pun tak dapat dihindarkan –antara tentara Indonesia dengan pasukan militer Belanda. Kondisi ini mengundang kemarahan Inggris, sebagai pemegang kendali keamanan Asia Tenggara, untuk campur tangan dalam konflik Indonesia-Belanda. Dengan demikian, ditempuhlah jalan damai melalui perundingan, yang di dalamnya terkandung misi diplomatik Indonesia untuk menarik simpati internasional bagi pengakuan kedaulatan Republik.

Namun, ketika perundingan dilakukan, muncul desakan dari kaum pemuda untuk menolak perundingan dengan pihak Belanda. Situasi ini segera memicu terjadinya aksi pemberontakan yang mengatasnamakan revolusi di beberapa daerah. Kebanyakan aksi mereka dipelopori oleh kaum muda dari kelompok Islam tradisional dan kaum komunis bawah tanah. Mereka mendesak pemerintah untuk segera melakukan penggantian kekuasaan dari sistem kekuasaan lama yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan Belanda.

Menurut Jenderal A.H. Nasution, dalam periode perjuangan fisik (1945-1949) perang dan damai merupakan pencerminan khas perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari cengkraman kolonialisme Belanda.¹⁷ Ada dua pola yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi ancaman bahaya dari pendudukan kembali kekuasaan Belanda. Pertama, pola diplomasi yang sejak semula telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendapatkan legitimasi internasional. Kedua, pola yang dilakukan oleh kaum muda (angkatan '45) dengan menggunakan kekuatan bersenjata atau perjuangan fisik.

a. Diplomasi dan Perang: Suatu Siasat Politik

Secara umum periode perjuangan fisik dapat disebut sebagai periode interaksi antara dua pola. Interaksi antara pola diplomasi dan konfrontasi, antara sikap moderat dan radikal, antara negosiasi dan ketetapan hati, antara kebijaksanaan dan keberanian. Seorang tokoh angkatan 45, Nugroho Notosusanto, mengakui bahwa kaum muda yang terlahir dari organisasi semi tentara pada masa pendudukan Jepang adalah generasi yang menyukai cara-cara penggunaan militer dan tindakan revolusioner sebagai antisipasi dan jalan keluar dari penyelesaian krisis.¹⁹ Sementara angkatan 28 yang dipelopori Soekarno dan Hatta dan kebanyakan dari anggotanya berada dalam pemerintahan, lebih menyukai cara-cara diplomasi.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa tujuan penulisan kembali sejarah diplomasi dan perang, bukanlah semata-mata ingin mengungkap kesan-kesan negatif yang muncul dari peranan angkatan 28 dan angkatan 45, melainkan berusaha untuk menguatkan fakta-fakta sejarah tambahan yang kurang mendapat perhatian serius di masa lalu. Mungkin dengan cara ini akan diperoleh penilaian yang seimbang (balancing) dan sekaligus dapat meluruskan penafsiran sejarah yang keliru sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru untuk mengaburkan jasa-jasa para pemimpin kita.²¹

Barangkali cukup beralasan jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa dalam perjuangan kemerdekaan, kelompok angkatan 28 lebih mengutamakan penggunaan diplomasi, sedangkan angkatan 45 menggunakan cara-cara militer. Menurut H.M Sabir, pendapat tersebut tidaklah terbantahkan. Namun, penilaian yang menggarisbawahi bahwa angkatan 28 hanya menyukai cara diplomasi dan angkatan 45 hanya menyukai perang, sangatlah tidak didukung oleh fakta-fakta yang meyakinkan, dan karenanya sulit untuk diterima. Sebenarnya dengan tidak banyak untuk mengungkapkannya, akan dapat ditemukan tidak sedikit fakta-fakta sejarah yang tidak membenarkan adanya garis demarkasi yang demikian tajam antara pendirian kedua generasi itu.

Dalam hal ini, Hatta menegaskan pentingnya kekuatan bersenjata untuk mendukung peranan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan republik. Dalam salah satu pidato radio pada Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang pertama Hatta mengatakan:

Diplomasi kita wujudnya menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa kita ingin damai, tetapi kita juga bersedia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita peroleh, betapa juga hebatnya perjuangan dan pertempuran yang kita hadapi. Dalam suatu pidato radio tujuh bulan lalu saya berkata, untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan diplomasi, perlulah ada gerakan yang kuat di dalam negeri yang menjadi sendi tindakan diplomasi itu. Jadinya, tenaga perjuangan yang kuat perlu sekali untuk menyokong usaha diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah. Diplomasi yang tidak disokong oleh tenaga perjuangan yang kuat, tidak akan berhasil. Kalau salah kita memakai tenaga perjuangan rakyat, kalau tidak pandai mempergunakannya dengan jalan yang rasional, diplomasi itu mungkin kandas, jalan menuju cita-cita jadi kabur dan gelap. Dan mungkin bertambah panjang. Sebab itu politik luar negeri yang dilakukan pemerintah mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Seluruh rakyat berdiri dengan tegapnya dan rapatnya di belakang pemerintah. Persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya daripada diplomasi yang dijalkannya.

Di sisi lain, sikap mendukung pelaksanaan diplomasi juga diutarakan oleh Jenderal Soedirman sebagai perwakilan dari angkatan 45:

Akhirnya kepada rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya kami serukan. ketahuilah saudara-saudara, delegasi kita sedang berhadapan muka dengan Komisi Jenderal untuk memecahkan soal-soal fasalfasal dalam nasakh Linggajati. Delegasi kita dengan susah payah sedang memperjuangkan nasib negara dan bangsa Indonesia seluruhnya. Jalannya perundingan ternyata sulit. Sampai saat ini belum terdapat sesuatu keputusan yang memuaskan sebagaimana yang kita harapkan bersama.²³

b. Menuju Meja Perundingan

Menyerahnya Jepang kepada tentara Sekutu pada Perang Dunia II, menandai berakhirnya era pax Japanese di kawasan Asia Tenggara. Secara berangsur, Jepang melepaskan negaranegara koloninya kepada Sekutu, termasuk Indonesia. Pemerintah Inggris yang diberikan kewenangan untuk mengelola keamanan di Indonesia, termasuk pelucutan senjata tentara Jepang, pada tahap awal telah berhasil melakukan kerjasama dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Namun, hal itu segera sirna ketika kekuatan militer Belanda yang membonceng kekuatan Inggris, memasuki wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang berbeda.

Kehadiran pasukan Belanda dirasakan akan mempersulit posisi pemerintah, dengan maksud ingin melanjutkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bagi pemerintah kolonial Belanda, usaha itu hanya mungkin tercapai, jika mereka berhasil melikuidasi pemerintah Republik Indonesia dan memperkecil dukungannya di arena internasional.

Di pihak lain, Inggris telah terikat pada nota kesepahaman yang dibuat oleh Sekutu. Dalam

persetujuan San Francisco tahun 1945, pihak Sekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II mengakui secara *de jure* kekuasaan Belanda atas Indonesia, dengan berdasarkan pada informasi-informasi yang sengaja dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meyakinkan kesetiaan rakyat Indonesia kepada Ratu Belanda. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Panglima Cruiser Skuadron V Inggris, Admiral Patterson, di Singapura pada tanggal 29 September 1945:

Inggris merasa berkewajiban untuk membantu politik pemerintah Belanda sesuai dengan persetujuan khusus (Civil Affairs Agreement) yang diadakan di London dengan pihak Belanda. Persetujuan itu menentukan bahwa Inggris akan menggunakan organisasi sipil Belanda di Indonesia yang dinamakan NICA (Netherlands Indies Civil Administration).

Dengan demikian, Belanda telah mendapatkan legitimasi kekuasaan di Indonesia, terutama setelah pasukan Inggris menyerahkan penanganan keamanan kepada Belanda.

Presiden Soekarno pada tanggal 20 Oktober 1945 di Jakarta, menyampaikan protes kepada Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, atas tindakan penindasan dan kekerasan yang dilakukan tentara NICA selama penanganan keamanan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah AS menyikapi dengan mengutus delegasi khusus untuk meninjau kondisi yang terjadi di Indonesia. Dalam laporannya kepada pemerintah Truman, Mayor Crockett mengatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh patroli militer Belanda telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh pihak Sekutu. Oleh sebab itu, AS meminta Inggris untuk menekan Belanda supaya secepatnya melakukan perundingan dengan pihak Indonesia.

c. Persetujuan Linggajati dan Renville

Pada tanggal 12 November 1946, atas desakan pihak Sekutu, Belanda akhirnya bersedia berunding dengan pemerintah Indonesia di Linggajati, Cirebon yang diwakili oleh Perdana Menteri (PM) pertama Sjahrir. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 25 Maret 1946, disetujui 17 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan bagi kedua belah pihak. Dalam pasal 1 pemerintah Belanda mengakui secara *de facto* tiga wilayah kekuasaan Indonesia: Jawa, Sumatera dan Madura. Dalam perspektif pemerintah kolonial Belanda pasal ini sangat memberatkan, mengingat ketiga pulau itu menyimpan kekayaan alam dan jumlah penduduk yang banyak.

Di sisi lain, perundingan Linggajati telah menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk Federal (pada tanggal 1 Januari 1949). Dengan memberikan otoritas kepada Ratu Belanda sebagai pemimpin simbolis Uni Belanda-Indonesia. Namun, perundingan Linggajati berlangsung sangat singkat akibat konsesi yang dihasilkannya telah memunculkan polemik dan perseteruan politik di masing-masing negara.

Sementara itu, Belanda secara sepihak membentuk negara federasi di kawasan Indonesia Timur. Dalam konferensi Bali, pada bulan Desember 1946, telah dibentuk dua buah negara federasi Indonesia Timur buatan Belanda. PM Sjahrir memprotes pembentukan kedua negara yang dilakukan secara sepihak itu. Proses politik itu telah memperuncing kecurigaan pemerintah terhadap Linggajati.²⁴

Dalam pada itu, untuk mensukseskan pengesahan perundingan Linggajati oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), pemerintah merasa perlu untuk memperbanyak jumlah keanggotaan komite dari 200 menjadi 514 orang, dengan memasukkan tokoh-tokoh pro pemerintah yang telah membentuk koalisi “sayap kiri” pada bulan Desember 1946. Meskipun demikian, pengesahan Linggajati tetap tidak dapat dipastikan. Akan tetapi, ketika semakin menjadi jelas bahwa Soekarno dan Hatta berencana akan melewatkan jabatan, apabila perundingan Linggajati tidak disetujui oleh parlemen. Maka barulah KNIP

mengesahkan perundingan Linggajati pada bulan Februari 1947. Bagaimanapun juga perluasan koalisi “sayap kiri” di parlemen menandai berakhirnya dominasi politik Sjahrir, karena kekuatan kelompok-kelompok kiri lainnya memiliki jumlah pengikut yang setara dan sama dengan jumlah pengikut Partai Sosialis.²⁵

Pada bulan Juni 1947, Amir Syarifuddin bersama kekuatan besar sayap kiri parlemen, menarik dukungannya terhadap pemerintahan Sjahrir, yang pergi ke luar negeri untuk mewakili Indonesia di forum PBB. Dalam waktu singkat pemerintahan Sjahrir berhasil digulingkan oleh kekuatan Amir Syarifuddin. Pada bulan Juli 1947, Amir Syarifuddin diangkat menjadi perdana menteri baru (tahun 1947-1948), menggantikan Sjahrir, tepat untuk menghadapi tekanan berat dari serangan-serangan militer Belanda.²⁶

Sekitar bulan Mei 1947, pihak Belanda sebetulnya telah memutuskan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Biaya pemeliharaan pasukan bersenjata sebanyak 100.000 serdadu di pulau Jawa, yang sebagian besar tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang tidak mungkin ditanggung oleh perekonomian Belanda yang hancur lebur akibat Perang Dunia II. Pemerintah kolonial sendiri tetap menginginkan untuk mempertahankan pasukan ini. Dengan demikian, mereka memerlukan pasokan komoditi dari pulau Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (minyak dan karet). Pasukan Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pemerintah RI dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan seluruh wilayah republik dalam waktu enam bulan.²⁷

Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, akhirnya Belanda melancarkan agresi militer yang pertama, di tengah instabilitas politik lokal pasca peralihan kekuasaan dari Sjahrir ke Amir Syarifuddin. Dalam tempo yang relatif singkat, pasukan Belanda berhasil melucuti dua wilayah sentral, republik, Jawa dan Sumatera, serta menguasai seluruh pelabuhan, perkebunan, instalasi-instalasi minyak dan batubara di kepulauan Jawa dan Sumatera. Di pihak lain, kekuatan pasukan republik menyingkir ke pegunungan untuk menghindari peperangan terbuka dan mengadakan perang gerilya bersama rakyat.

Sikap agresif Belanda akhirnya tercium oleh rekan seternya, Inggris dan Amerika Serikat, mereka kecewa dengan cara-cara penaklukan yang dilakukan Belanda. Kasus ini akhirnya diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mendesak Belanda untuk melakukan gencatan senjata dan mengajaknya kembali ke meja perundingan. PBB membentuk Komite Jasa Baik (KJB) yang diprakasai oleh Amerika Serikat. Pada bulan Januari 1948, diadakanlah perundingan baru di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Perundingan ini mengakui gencatan senjata sepanjang Garis Van Mook, yaitu suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan kekuasaan Belanda di Indonesia.²⁸

Namun, tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh kelompok sayap kiri kepada pemerintahan Amir Syarifuddin, pada akhirnya memaksa mundur PM Amir Syarifudin dan mengabaikan perjanjian Renville yang telah ditandatangani. Dalam suasana kritis menjelang agresi militer Belanda kedua, presiden Soekarno menunjuk Mohammad Hatta untuk memimpin kabinet baru.

Hatta dan Perjuangan Politik Bebas Aktif

Periode awal pemerintahan PM Hatta ditandai dengan situasi politik lokal yang carut marut. Usaha pertama PM Hatta untuk menyusun kabinet yang solid menemui hambatan, ketika Sjahrir menolak tawaran untuk menempati pos kementerian luar negeri. Dalam gelanggang internasional, Sjahrir telah diakui oleh negara-negara Barat karena pidato pembelaannya bagi Republik yang disampaikan di depan sidang Dewan Keamanan PBB. Jabatan menteri luar negeri akhirnya dipegang oleh Haji Agus Salim. Mantan teman-teman Hatta di Perhimpunan

Indonesia (PI), seperti Sukiman, Ali Sastroamidjojo dan Maramis, wakil dari Masyumi dan PNI, masing-masing diangkat sebagai menteri dalam negeri, menteri keuangan dan menteri pendidikan, sedang-kan jabatan menteri pertahanan dipegang sendiri oleh Hatta.

Rancangan program PM Hatta memiliki empat tujuan pokok; Pertama, implementasi perjanjian Renville dengan melanjutkan perundingan secara terus-menerus melalui Komite Jasa Baik. Kedua, pembentukan negara Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Ketiga, rasionalisasi tentara dan pegawai negeri berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi manajemen beserta minimnya sumber daya negara. Keempat, melakukan rekonstruksi nasional. Tentang perjanjian Renville, Hatta berkomentar, suka atau tidak suka pemerintah Indonesia telah terikat untuk melaksanakan perjanjian Renville yang telah disetujuinya.

Program kabinet Hatta itu bukan tidak mendapat reaksi dari kelompok lain. Kekuatan sayap kiri parlemen, yang terdiri dari partai sosialis pimpinan Amir Syarifuddin, PKI, Partai Buruh dan Persindo memfusikan diri dalam parlemen dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), mereka mengambil jalan politik berlawanan sebagai kekuatan oposisi pemerintah di parlemen, dengan terus mendesak pemerintah untuk menolak perjanjian Renville dan membangun kekuatan bersama kelompok komunis Uni Soviet.

Dalam salah satu statement politiknya FDR menyatakan, perjuangan rakyat Indonesia sepatutnya menjadi bagian dari revolusi dunia, ia harus memilih berada di pihak Uni Soviet, dan bukan sebaliknya, tunduk dan patuh dalam bayang-bayang dominasi Barat.³⁰ Dalam memoarnya, yang dituliskan pada usia senja, Hatta melukiskan kekecewaannya itu terhadap sikap kelompok oposisi, khususnya penolakannya terhadap perjanjian Renville.

“Apa yang membingungkan ialah bahwa dalam perdebatan yang berlangsung kemudian, kelompok Amir Syarifuddin di dalam BP-KNIP yang justru menentang kebijakan pemerintah saya. Mereka yang telah menghasilkan perjanjian itu, ingin supaya ini ditolak.”³¹

Dalam perseteruan politik lokal yang memanas, PM Hatta memberikan pidato keterangan tentang status politik pemerintah di hadapan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) di Yogyakarta, pada tanggal 2 September 1948. Hatta menjelaskan dengan panjang lebar pokok-pokok kebijakan pemerintahannya mengenai maksud dan tujuan dari pelaksanaan politik luar negeri, khususnya untuk menyikapi situasi politik internasional yang melulu bertumpu pada kekuatan bipolarisme, Timur dan Barat. Dalam hal ini, Hatta menegaskan:

Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya, harus memilih saja antara pro-Rusia ataukah pro-Amerika Serikat? Apakah tak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri Politik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi

..... Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negeri lain yang berdasarkan kepentingan negeri itu sendiri.³²

Pidato keterangan pemerintah ini kemudian dihimpun oleh kementerian penertarikan sebagai naskah bersejarah dari lahirnya politik luar negeri Indonesia yang dewasa ini dikenal dengan “politik bebas aktif”. Menurut Hatta, politik luar negeri Indonesia harus bebas, yang mengandung pengertian tentang kesanggupan bangsa Indonesia untuk menentukan jalan sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik pihak manapun. Sementara kata aktif menjelaskan tentang keyakinan bangsa Indonesia menuju pada terciptanya perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa dan negara.

Di sisi lain, kalangan oposisi yang kecewa dengan sikap pemerintah mengkonsolidasikan dirinya untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Sekembalinya Muso dari Uni Soviet pada tanggal 3 Agustus 1948, PKI menyusun suatu “jalan baru” dengan mengambil alih tugas-tugas FDR. Hatta secara pribadi mengamati pergerakan itu, sebagai rencana Muso yang berkeinginan untuk mendirikan negara Soviet di Indonesia.

Tak syak lagi dengan haluan politik pemerintah, pada tanggal 18 September 1948, di Madiun, Jawa Timur, PKI melakukan *coup d'état* terhadap pemerintahan PM Hatta. Mendengarkan kejadian itu, Muso merasa kaget dan kecewa, karena menurutnya, aksi perlawanan itu dilakukan dalam situasi yang belum matang dan terencana dengan baik. Di sisi lain, peristiwa Madiun telah menyeret pemerintah ke dalam krisis yang semakin tajam. Dalam situasi demikian, Soekarno untuk kedua kalinya berbicara dalam panggung terbuka untuk memperdaya masyarakat Jawa ke dalam pangkuan Republik. Pada tanggal 19 September 1948, ia menyampaikan opsinya kepada masyarakat untuk memilih antara Muso atau Dwitunggal. Namun, dua jam sesudah itu, giliran Muso memberikan jawabannya melalui siaran radio untuk mengajak rakyat menggulingkan kekuasaan Soekarno-Hatta yang dianggapnya telah berkolaborasi dengan kekuatan imperialisme Barat, terutama Amerika Serikat.

Untuk menanggulangi aksi pemberontakan yang semakin meluas, PM Hatta mengambil langkah-langkah strategis pemulihan keamanan dengan mengasukan pasukan personel pemerintah untuk secepatnya menangkap para tokoh pimpinan PKI di Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Di antara mereka termasuk Tang Ling Djie dan Abdul Madjid, serta beberapa orang lainnya yang tidak mengetahui berita pemberontakan, turut diamankan oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menyusun payung hukum, dengan menggelar sidang darurat BP KNIP untuk meminta restu dari parlemen agar dapat memberlakukan undang-undang keadaan darurat. Di samping itu, Hatta menugaskan pasukan Divisi Siliwangi untuk memberangus pergerakan PKI di pula Jawa.

Instabilitas politik dan keamanan yang terjadi di dalam negeri, memberikan celah kepada Belanda untuk memperluas jaringan kekuasaannya di daerah. Secara sepihak, Belanda memutuskan untuk menghentikan perjanjian Renville yang kemudian diteruskan dengan penyerangan agresi militer kedua pada tanggal 18 Desember 1948. Dalam situasi yang kacau balau, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan pusat kekuasaan (ibu kota) ke Yogyakarta. Sementara itu, untuk menyelamatkan pemimpin negara dari kejaran pasukan militer Belanda, Jenderal Soedirman mendesak Soekarno dan Hatta untuk ikut bergerilya bersama rakyat di pegunungan. Namun, permintaan itu tidak diindahkan oleh Soekarno dan Hatta, mereka tetap tinggal di Yogyakarta di mana secara bersamaan mereka bersedia untuk ditangkap oleh pasukan Belanda.

Sebelum peristiwa itu, Hatta menyempatkan waktu untuk membuat sepucuk surat agar dipublikasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam suratnya itu, ia menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada Syarifuddin Prawiranegara, menteri urusan ekonomi yang berkedudukan di Bukittinggi, untuk memimpin suatu pemerintahan darurat. Dan apabila pemerintahan itu jatuh juga akan diberikan kepada menteri keuangan, Maramis, yang saat itu berada di Amerika Serikat, untuk membentuk pemerintahan di daerah pengasingan.

Sementara itu, dari Bandung, pasukan Divisi Siliwangi berhasil merangsek sampai ke Surakarta untuk menumpas pergerakan Komunisme. Secara sinronik, peristiwa itu menandai titik balik paling penting dalam hubungan RI dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menganggap hal itu sebagai bentuk kerjasama elit politik Indonesia dalam memutuskan pergerakan Komunisme di Indonesia. Situasi yang terakhir ini memberikan kedudukan penting

bagi posisi diplomatik pemerintah. Sebaliknya hal itu menjadikan pukulan telak bagi posisi diplomatik Belanda.

Pemerintah Amerika Serikat melalui Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membawa sengketa Indonesia-Belanda kepada forum internasional. Sebagai tindak lanjut dari gagasan itu, maka dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) yang masing-masing menjadi penengah bagi Indonesia dan Belanda. Dalam kesepakatan yang disetujui oleh Mr. Mohammad Roem dengan Dr. J.H Van Royen, akhirnya para pemimpin dan tokoh politik Indonesia dibebaskan dari tahanan Belanda. Selanjutnya, proses penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diselenggarakan di Den Haag.

PM Hatta memimpin langsung delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, dan mengangkat Mr. Mohammad Roem sebagai wakilnya. Sedangkan Soekarno tetap berada di Indonesia. Dalam perjalanan menuju konferensi, Hatta menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Jawaharlal Nehru di India, dan meminta saran-saran darinya. Hatta menyatakan rasa terima kasih rakyat Indonesia atas dukungan yang diberikan India kepada Republik Indonesia. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Eropa. Dalam hal ini, Hatta tidak melukiskan tentang perasaan pribadinya saat kembali ke negeri Belanda, yaitu sejak ia meninggalkan negeri itu selama tujuh belas tahun. Ia pergi pada bulan Juli 1932, sebagai seorang pemuda nasionalis yang baru lulus sebagai sarjana, dan kembali ke negeri itu sebagai perdana menteri dan kepala pemerintahan.³⁴

Konferensi Meja Bundar secara resmi dilangsungkan di Gedung Ksatria, Den Haag, dan dipimpin oleh perdana menteri Belanda, Dress. Dalam pidato sambutannya di hadapan sidang majelis, Hatta menyatakan tentang kegagalan Belanda dalam menyikapi arus besar perubahan yang dialami oleh rakyat Indonesia selama berada dalam kekuasaan Jepang, di mana mereka berkeinginan kuat untuk merdeka. Di samping itu, Hatta juga mengingatkan kepada pemerintah Belanda terhadap jaminan atas keselamatan modal dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia.

Dalam perundingan KMB yang alot, Belanda berusaha untuk sedapat mungkin meminang Indonesia ke dalam uni yang kuat. Sementara delegasi Indonesia, yang banyak mendominasi persidangan, menghendaki suatu uni yang longgar dengan ikatan yang lemah mungkin. Perdebatan ini berakhir dengan dirumuskannya tiga persetujuan dasar, yaitu: penyerahan kedaulatan, pelebagaan uni dan tindakan-tindakan peralihan yang memuat ketentuan-ketentuan praksis peralihan kedaulatan itu.

Isu lain yang juga hangat dibicarakan dalam KMB adalah masalah keuangan (finance). Pemerintah kolonial Belanda mendesak Indonesia untuk menerima hutang-hutang yang telah dipakai untuk menutupi anggaran perang Belanda ketika melawan Indonesia, dengan besaran f 3.167 juta untuk hutang luar negeri dan f 2.956 juta untuk hutang dalam negeri.³⁵ Hatta dengan tegas menolak untuk menanggung hutang-hutang itu. Selanjutnya ia menginstruksikan Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ketua subkomite ekonomi dan keuangan, untuk menyajikan angka-angka tandingan, tetapi Belanda tetap konsisten dengan angka-angka yang dimajukannya.

Di sela waktu yang luang, Hatta menuliskan sebuah kawat kepada Nehru dan memintanya untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Belanda telah menuntut terlalu banyak kepada Indonesia. Dalam pada itu, Hatta memanfaatkan keuntungan dari ketegangan yang diakibatkan oleh Perang Dingin.

Menurut Hatta, apabila pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan garansi kepada Indonesia, ia akan menyerahkan kedaulatan Republik kepada kaum komunis. Di sisi lain,

Cohran, perwakilan dari Amerika Serikat, men- desak Hatta untuk menyetujui pengurangan angka sebesar f 2.000 juta, ia mengingatkan Hatta, bahwa kehilangan kedaulatan bukan saja akan me- munculkan sebuah konflik baru, tetapi juga berarti kehilangan simpati Ame- rika Serikat.

Dengan demikian, Hatta akhirnya menyetujui angka sebesar f 4.300 juta pa- da tanggal 24 Oktober 1949, dengan terlebih dahulu diawali perdebatan antara Hatta dengan Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang bersikap keras menolak hasil negosiasi. Dalam hal ini, Mohammad Roem mendukung sikap Hatta, dan memarahi Sumitro yang bersikap begitu keras. Dalam menge- nang kejadian itu, Sumitro mengungkapkan perasaan pribadinya bahwa meskipun ia masih tetap teguh pada pandangannya, tetapi ia dapat mema- hami betapa sulitnya posisi dan peran Bung Hatta ketika memimpin pem- bicaraan dalam konferensi. Di sisi lain, Critchley, seorang wakil dari Aus- tralia, juga mengakui bahwa ia pun merasa tidak puas dengan jumlah angka yang disetujui, tetapi menurutnya, tidaklah mungkin konferensi semata-ma- ta hanya membicarakan persoalan itu.

Persoalan terakhir yang dibahas dalam konferensi adalah masalah pembe- basan Irian Barat. Soekarno meminta Hatta untuk sekuat tenaga memper- juangkan pembebasan Irian Barat, dan mengingatkannya supaya delegasi Indonesia tidak kembali ke tanah air tanpa Irian Barat. Dalam kaca mata Hatta, masalah itu sangatlah problematis untuk dipaksakan dalam KMB, Hatta akhirnya memilih untuk menundanya. Dalam perspektif Hatta, masa- lah pembebasan Irian Barat justru dapat mudah diselesaikan, jika peme- rintah Belanda telah mengambil langkah penting untuk mengakui kedau- latan RI. Masalah Irian Barat akhirnya dapat dipecahkan pada pukul lima pagi pada tanggal 1 November 1949, dengan konsesi bahwa peralihan kedau- latan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun, setelah per- janjian KMB.

Konferensi Meja Bundar secara resmi ditutup pada tanggal 2 November 1949, dengan ditandatangani sebuah dokumen bersejarah. Dalam suasana sidang yang melelahkan, Hatta menyampaikan pidato penutupannya dengan mengakui bahwa: “pekerjaan kami agak sulit karena adanya kenyataan bahwa tidak seluruh persoalan dalam Konferensi Meja Bundar dapat diselesaikan”. Di samping itu, Hatta juga menjelaskan tentang keberadaan uni yang berbeda dengan kebijakan persekutuan pada masa lalu. Dalam hal ini, rakyat Indonesia tidak lagi diposisikan sebagai inferior, sebagaimana dimasa lalu, melainkan berdasarkan pada prinsipprinsip kebebasan, kesamaan dan kesetaraan.

Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, di Istana Kerajaan di Amster- dam, Hatta menerima pengakuan kedaulatan Indonesia. Ia bersama perdana menteri Belanda menandatangani Protokol pemindahan kedaulatan. Semen- tara itu Ratu Juliana membacakan Akta Penegasan, dengan menyatakan:

Kita tidak lagi berdiri terpisah untuk saling bermusuhan. Kita sekarang mengambil kedudukan yang sejajar betapapun mungkin kita sakit dan terluka dengan meninggalkan goresan dendam dan penyesalan.

Kesimpulan

Di tanah air, kehangatan menyelimuti kedatangan Hatta bersama delegasi Indonesia lainnya. Berbagai atribut yang melambangkan kesuksesan peme- rintah dipampang sepanjang jalan protokol. Rakyat Indonesia menyambut kedatangan Hatta dengan antusiasme yang besar. Sedangkan Hatta sendiri mengenang peristiwa itu dengan penuh simbolik, mengingatkannya pada cita-cita besar yang diangkannya semenjak kecil. Inilah puncak dari karier kehidupan

Hatta, karena kehidupan selanjutnya mengabur tanpa arti, menjauhkannya dari praktik-praktik politik yang egaliter dan demokratis, sebagaimana Hatta melukiskannya dalam memoarnya.***

Bibliografi

- A. Couloumbis, Theodore dan H Wolfe, James, *Introduction to International Relations: Power and Justice* (New Jersey: Prentice Hall, 1978).
- A. Mc Clelland, Charles, *Theory and the International System*, (terj.) (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1981)
- Abdullah, Taufik “Upacara, Pengalaman dan Identitas Bangsa,” *Majalah Tempo*, 17 Agustus 2005.
- Drs. R. Soeprapto, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku* (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 1997).
- Hatta, Mohammad, “Bulat Bersatu Mengadapi Masa Yang Genting,” dalam *Kumpulan Pidato I* (Jakarta: Penerbit Gunung Agung 2002).
- Hatta, Mohammad, *Memoir* (Jakarta: Penerbit Tintamas 1982).
- Hatta, Mohammad, *Mendayung Antara Dua Karang* (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 197).
- Kompas, 11 Agustus 2005.
- Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*, (terj.) (Jakarta: Penerbit Pustaka Gramedia, 1999), cet. 1.
- Nasution, A.H., *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata* (Jakarta: Mega Bookstore, 194).
- Nasution, A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1977).
- H.M Sabir, *Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan* (Jakarta: CV. Haji Masagung: 1987).
- Noer, Deliar, *Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990).
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (terj.) (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).
- Rose, Mavis, *Indonesian Free: A Political Biography of Mohammad Hatta* (terj.) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1991).
- Sabir, H. Mohammad, *Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987).
- Sudarsono, Juwono, *State of Art, Hubungan Internasional Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996).
- Suseno, Magnis, Franz, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Pustaka Gramedia, Jakarta, 2001).
- Swasono, Edi, Sri dan Ridjal, Fauzie (edt), *Satu Abad Bung Hatta:*
- Demokrasi Kita, Politik Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2002).
- Zainuddin, A. Rahman, “Pemikiran Politik”, *Jurnal Ilmu Politik* (Jakarta: Pustaka Gramedia, Jakarta, 1990), Volume. 7.